

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Taruna dapat menerapkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan data primer seperti survey inventarisasi ruas jalan, inventarisasi perlengkapan jalan, survey konflik lalu lintas dan sebagainya, serta mengembangkan pengetahuan dalam menyikapi kendala saat pengumpulan data primer.
2. Taruna dapat menjadi ahli keselamatan jalan yang tidak menutup kemungkinan dapat bekerja di instansi yang menangani keselamatan jalan seperti dishub, PU, serta pada saat PKP di dinas perhubungan Kabupaten Sidoarjo seringkali mengikuti dan menjadi perwakilan dalam pertemuan antar instansi sehingga para taruna sanggup berinteraksi dan bersosialisasi dengan dunia kerja.
3. Taruna bekerja sama dengan instansi atau Lembaga yang ada di Kabupaten Sidoarjo dalam permohonan data guna mendukung penyusunan buku kinerja keselamatan jalan Kabupaten Sidoarjo.
4. Pelaksanaan PKP mendukung bertambahnya wawasan taruna serta dapat menerapkan potensi dalam diri masing-masing taruna sehingga menjadi pribadi yang lebih unggul.
5. Mengubah pola pikir taruna dari teori yang didapatkan selama pembelajaran sehingga dapat diterapkan di lapangan.
6. Kinerja penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan dari penyelenggaraan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) di Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam kategori baik yaitu dengan nilai 68,56% dengan nilai bobot setiap pilar adalah sebagai berikut:
 - a. Pilar 1 manajemen keselamatan jalan yang dileading sektori oleh BAPPEDA dengan total bobot program yang terpenuhi sebesar 59,79%. Berikut adalah program-program RUNK yang terpenuhi yaitu :

No.	Variabel	Indikator
1	Sinkronisasi dan Koordinasi tentang Keselamatan	Pembentukan forum di bidang keselamatan transportasi
	Protokol Kelalulintasan Kendaraan Darurat	Penyusunan pedoman kelalulintasan kendaraan darurat
	Riset Keselamatan Jalan	Pelembagaan tata kelola penelitian.
	Surveillance Injury dan Sistem Informasi Terpadu	Memberikan kemudahan publik untuk mengakses
	Dana Keselamatan Jalan	Pembentukan badan pengelola dana keselamatan jalan.
		Penyediaan dana keselamatan jalan.
	Kemitraan Keselamatan Jalan	Mempersiapkan pedoman untuk pengaturan kemitraan dengan bisnis dan masyarakat.
		Implementasi kemitraan keselamatan jalan.
	Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum.	Sistem manajemen keselamatan untuk operator angkutan umum.
Penyempurnaan Regulasi Keselamatan Jalan.	Tinjauan dan pembuatan peraturan lalu lintas baru yang mengakomodasi aspek keselamatan.	
	Peningkatan sosialisasi peraturan lalu lintas dan peraturan lalu lintas baru.	

- b. Pilar 2 jalan yang berkeselamatan dileading sektori oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan bobot program RUNK yang terpenuhi sebesar 66%. Berikut ini adalah program RUNK yang terpenuhi yaitu :

No.	Variabel	Indikator
2	Badan Jalan yang Berkeselamatan	Penyediaan manajemen peningkatan jalan terkait dengan kelayakan keselamatan.
		Implementasi penutupan jalan berlubang.
		Perbaikan genangan air.
		Implementasi perbaikan bahu jalan.

No.	Variabel	Indikator
	Perencanaan dan Implementasi Keselamatan Jalan.	Penyediaan operasi jalan yang berkeselamatan.
		Implementasi perencanaan keselamatan jalan.
		Implementasi pekerjaan jalan yang berkeselamatan.
		Pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan.
		Implementasi perbaikan lokasi rawan kecelakaan.
		Menyelenggarakan manajemen kecepatan, termasuk traffic calming
	Menyelenggarakan peningkatan standar kelaikan jalan yang berkeselamatan	Menyediakan standar kelaikan jalan yang berkeselamatan
		Menyediakan pedoman manajemen penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan
	Lingkungan jalan yang berkeselamatan	Menyediakan tata laksana penertiban dan penataan lingkungan jalan terkait keselamatan
		Mengendalikan fungsi ruang tepi Jalan

- c. Pilar 3 kendaraan yang berkeselamatan dileading sektori oleh Dinas Perhubungan dengan total bobot program RUNK yang terpenuhi sebesar 85%. Berikut adalah program yang terpenuhi yaitu :

No.	Variabel	Indikator
3	Kepatuhan Pengoperasian Kendaraan	Menyelenggarakan inspeksi kepatuhan pengoperasian kendaraan bermotor
	Penyelenggaraan dan Perbaikan Prosedur Uji Berkala dan Uji Tipe	Memperbaiki prosedur dan manual uji berkala dan uji tipe
		Mengembangkan sistem pengujian techno-based

No.	Variabel	Indikator
		Mengevaluasi sistem pengujian berkala dan uji tipe (SDM, penyelenggaraan, infrastruktur, pendataan system informasi, penerapan sistem akreditasi)
	Penerapan Manajemen Kecepatan	Menetapkan batas kecepatan
		Menetapkan prosedur penanganan pelanggaran kecepatan
	Penanganan Muatan Lebih (Overloading)	Mengorganisir partisipasi masyarakat dalam gerakan Say No to Overloading.
		Penerapan tata kelola muatan berlebihan.
		Penyempurnaan fungsi jembatan timbang.
		Pengaturan dimensi dan volume pengangkutan (mixer, bak, tangki) pada angkutan dalam uji kendaraan bermotor.
	Penghapusan Kendaraan (Scrapping).	Penghapusan Kendaraan (Scrapping).
	Penetapan Standar Keselamatan Kendaraan AU	Penentuan Standar Keamanan Kendaraan Umum.
	Penyempurnaan Prosedur Uji Tipe bagi Kendaraan Bermotor yang diimpor dalam Keadaan Bukan Baru dan Modifikasi	Kendaraan impor dan modifikasi yang lolos uji tipe
	Pengembangan Riset dan Desain Kendaraan Bermotor	Desain kendaraan yang berkeselamatan

- d. Pilar 4 pengguna jalan yang berkeselamatan dileading sektori oleh Satlantas Polresta dengan total bobot program RUNK yang terpenuhi sebesar 71%. Berikut adalah program yang terpenuhi yaitu :

No.	Variabel	Indikator
4	Pemeriksaan Kondisi Pengemudi	Penetapan standar kesehatan pengemudi(batasan umur; penyakit risti/cacat bawaan; kebutuhan alat bantu; perilaku tidak sehat; pikun; dll)
		Penyelenggaraan pemeriksaan standar kesehatan pengemudi saat mendapatkan SIM
		Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan secara berkala
		Penyelenggaraan patroli perilaku yang membahayakan keselamatan
		Pengaturan pembatasan hak mengemudi yang terkait faktor kondisi pengemudi
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sistem Uji SIM	Peningkatan kualitas materi uji USAHA SIM
		Peningkatan kualitas dan kuantitas instruktur penguji SIM
		Penyediaan fasilitas pendidikan Pengemudi
		Penerapan SIM elektronik
	Penyempurnaan Prosedur Uji SIM	Penetapan penjenjangan SIM
	Pembinaan Teknis Sekolah Mengemudi	Penetapan standar pembinaan teknis sekolah mengemudi
	Penanganan Terhadap 5 Faktor Risiko Utama Plus	Penegakkan hukum bagi pelanggar penggunaan helm bagi pengguna sepeda motor
		Penegakkan hukum bagi pelanggar penggunaan sabuk keselamatan
		Penegakkan hukum bagi pelanggar penggunaan alat keselamatan yang diperuntukkan pengguna jalan rentan
		Penegakkan hukum bagi pelanggar penggunaan telepon seluler

No.	Variabel	Indikator
		Penggunaan Elektronik Penegakan Hukum
		Pendidikan Formal dan Informal Keselamatan Jalan
		Kampanye Keselamatan : 1) 5 faktor risiko utama plus (helm, sabuk keselamatan, speeding, mabuk, penggunaan telepon seluler, pengguna jalan rentan); 2) Perilaku sehat di jalan

- e. Pilar 5 penanganan pasca kecelakaan yang dileading sektori oleh Dinas Kesehatan dengan total bobot program RUNK yang terpenuhi sebesar 61%. Berikut adalah program yang terpenuhi yaitu :

No.	Variabel	Indikator
5	Sistem Layanan Gawat Darurat Terpadu	Penyediaan pos gawat darurat terpadu (<i>Public Safety Center</i>)
		Penyediaan tenaga medis yang kompeten
		Penyediaan tenaga awam terlatih untuk P3K
		Penyelenggaraan uji coba ketanggap darurat kecelakaan.
	Sistem Komunikasi Gawat Darurat <i>Oneaccess code</i> (<i>Nomor Darurat</i>)	Penetapan <i>one access code</i>
	Penjaminan Korban Kecelakaan yang Dirawat di Rumah Sakit Rujukan	Pengembangan sistem rujukan berjenjang dari fasilitas kesehatan primer sampai tersier
		Penetapan aturan mengenai penjaminan atas penanganan korban di rumah sakit
	Penjaminan korban kecelakaan yang dirawat di rumah sakit rujukan	Pemastian skema penjaminan dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak (asuransi, rumah sakit dan pengendara yang turun ke jalan)
	Asuransi Pihak Ketiga	Terselenggaranya asuransi pihak ketiga

No.	Variabel	Indikator
	Pengalokasian Sebagian Premi Asuransi untuk Dana Keselamatan Jalan	Tersedianya dana keselamatan jalan yang bersumber dari premi asuransi kecelakaan

7. Jumlah kejadian kecelakaan dalam 5 tahun terakhir (2014-2018) rata-rata naik 5,34%, sedangkan tingkat keparahan korban pada tahun 2014 hingga 2016 rata-rata naik 12% lalu pada tahun 2017 turun 25% dan pada tahun 2018 naik 5% dengan korban kecelakaan didominasi oleh usia produktif sebesar 36% dari total korban kecelakaan berdasarkan usia yaitu pada usia 16 tahun sampai 30 tahun.

8. Hasil dari perankingan daerah rawan kecelakaan dengan metode Angka Ekuivalen Kecelakaan diperoleh tiga ruas sebagai ruas lokasi rawan kecelakaan yaitu:

- a. Ruas jalan Krian - Balongbendo
- b. Ruas jalan Sumokembangsri - Bakungtemenggungan
- c. Ruas jalan Sidorejo - Krian.

Dari tiga lokasi rawan kecelakaan rata-rata masih perlu perbaikan terutama di badan jalan dan fasilitas perlengkapan jalan berupa perbaikan rambu lalu lintas yang mengalami kerusakan maupun penyingkiran penghalang karena terdapat benda yang menghalangi daun rambu, pengecatan kembali untuk marka jalan yang sudah pudar, perbaikan alat penerangan jalan yang mengalami kerusakan atau tidak menyala pada malam hari maupun penyingkiran penghalang karena terdapat benda yang menghalangi atau mengurangi intensitas pencahayaan.

B. Saran

Penulis memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo terkait dengan penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo

- a. Peningkatan Forum LLAJ karena untuk saat ini koordinasi banyak dilakukan hanya oleh beberapa instansi.

- b. Membuat Protokol Kelalulintasan Kendaraan Darurat karena hal tersebut penting selain tertuang dalam peraturan juga dikarenakan kendaraan darurat merupakan kendaraan khusus yang harus dibuatkan protokol atau aturan tersendiri dan ini perlu didiskusikan dalam forum LLAJ di suatu daerah untuk pemenuhan kelalulintasan yang aman, tertib dan selamat.
- c. Mensimulasikan dan mensosialisasikan protokol operasi kelalulintasan kendaraan darurat secara rutin.
- d. Mengembangkan Riset Keselamatan Jalan setiap tahun untuk meningkatkan data sehingga dapat diketahui rekomendasi yang tepat sesuai progres data riset tersebut.
- e. Memperbaiki database kecelakaan dan mengintegrasikan data kecelakaan dengan instansi terkait lainnya.
- f. Menyebarkan informasi (deseminasi) laporan tahunan kecelakaan.
- g. Menjalankan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum dan melakukan pembiasaan teknis terhadap Perusahaan Angkutan Umum. Hal tersebut terkait dengan manajemen di dalam perusahaan tersebut karena manajemen yang baik merupakan pondasi kokoh untuk perkembangan suatu perusahaan angkutan.

2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo

- a. Untuk Dinas Bina Marga, meningkatkan respon penanganan dalam perbaikan jalan terutama di lokasi rawan kecelakaan yang berupa penutupan lubang jalan, genangan air, penanganan jalan licin, perbaikan bahu jalan.
- b. Untuk Dinas Perhubungan, meningkatkan respon penanganan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana pendukung transportasi (Marka, Rambu, Lampu Jalan, Halte, Trotoar dsb).
- c. Melakukan Inventarisasi dan Inspeksi keselamatan jalan secara rutin dan berkala dengan tujuan agar kekurangan di lapangan seperti perlengkapan jalan dapat dilakukan perbaikan dan pemasangan.

3. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

- a. Membuat prosedur penanganan terhadap pelanggar kecepatan berupa standar operasional prosedur apa yang harus dilakukan apabila terdapat pengendara yang melebihi batas kecepatan termasuk sanksi yang nantinya akan diberikan.
- b. Meningkatkan teknologi penegakan hukum terkait pelanggaran kecepatan.

4. Satlantas Polresta Kabupaten Sidoarjo

- a. Meningkatkan pemeriksaan kondisi pengemudi.
- b. Melakukan pembinaan teknis terhadap sekolah mengemudi karena apabila manajemen serta pelatih pengemudi tersebut telah melalui pembinaan ataupun diklat maka keselamatan jalan lebih terjamin.
- c. Menyelenggarakan Akreditasi terhadap Sekolah Mengemudi.
- d. Melakukan Pelatihan dan Pendidikan kepada SDM Sekolah mengemudi.
- e. Meningkatkan kegiatan penanganan terhadap faktor 5 resiko utama plus pada kecelakaan guna menurunkan fatalitas korban kecelakaan.

5. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo

Menyediakan Sistem Layanan Gawat Darurat Terpadu melalui :

- a. Penyediaan Pos Gawat Darurat terpadu.
- b. Penyediaan tenaga medis yang mempunyai kompetensi penanganan kecelakaan.
- c. Penyediaan Standart Operasional Prosedur Kegawat Daruratan Protocol Kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2004. *Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan*: Jakarta.
- _____. 2009. *Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*: Jakarta.
- _____. 2009. *Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*: Jakarta.
- _____. 2010. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*: Jakarta.
- _____. 2010. *Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 – 2035*: Jakarta.
- _____. 2014. *Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2014 tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011 – 2020*. Jakarta
- _____. 2014. *Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas*. Jakarta.
- _____. 2014. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan*. Jakarta
- _____. 2015. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan*. Jakarta
- Bappeda. 2015. *Masterplan Transportasi Kabupaten Sidoarjo Tahap II Tahun Anggaran 2015*. Kabupaten Sidoarjo.
- Bappeda. 2019. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo*. Kabupaten Sidoarjo.
- Bappeda. 2015. *Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015*. Kabupaten Sidoarjo.
- Bappeda. 2016. *Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016*. Kabupaten Sidoarjo.
- Bappeda. 2017. *Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017*. Kabupaten Sidoarjo.

- Bappeda. 2018. *Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018*. Kabupaten Sidoarjo.
- Bappeda. 2019. *Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019*. Kabupaten Sidoarjo.
- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2004. *Pedoman Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas*. Jakarta
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*. Jakarta
- Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 2014. *Zona Selamat Sekolah (ZoSS)*. Jakarta
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 2016. *Panduan Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan*. Jakarta: Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan.
- Dishub Kabupaten Sidoarjo. 2017. *Dokumen Akhir Teview Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 – 2021*. Kabupaten Sidoarjo
- Kementerian Kesehatan. 2017. *Buku Saku Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi*: Jakarta
- Kementerian Perhubungan. 2009. *Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor*. Jakarta
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2009. *Peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi*. Jakarta
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor*: Kabupaten Sidoarjo
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2016. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021*: Kabupaten Sidoarjo
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2005. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025*: Jawa Timur
- Polresta Kabupaten Sidoarjo. 2019. *Data Satlantas Korban Kecelakaan tahun 2014 – 2018*. Sidoarjo
- Wijayanto, Hendra. 2016. *Pengukuran Kinerja Keselamatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggunakan Analytic Network Process dan Rating Scale di Kota Palembang*. Tegal: Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan